

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas izin dan Berkah-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2019 dapat disusun. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan kewajiban tiap OPD berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Serta Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Acuan dalam Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Instansi Pemerintah yang menginstruksikan kepada seluruh jajaran Pemerintah mulai dari Kementerian Pejabat Eseleon I dan II, Gubernur Kepala Daerah sampai pada Bupati/Walikota.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan salah satu indikator dalam rangka menciptakan dan meningkatkan pelaksanaan Pemerintah yang baik (Good Governance) sebagai salah satu agenda dari amanat Reformasi, maka dipandang perlu adanya suatu sistem Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk dapat mengukur kinerja suatu Instansi/Lembaga dalam mengimplementasikan Visi, Misi dan Tujuan Organisasi.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai kepada semua pihak sekaligus sebagai evaluasi dalam peningkatan kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai pada tahun – tahun berikutnya, guna meningkatkan pelaksanaan Pemerintah yang baik berdaya guna, berhasil guna, bersih dan berwibawa.

Luwuk, Januari 2020.


KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BANGGAI
Drs. H. PAIMAN KARTO, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19630612 198903 1 013



**PAPARAN KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BANGGAI
PADA
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**



Assalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2019 telah selesai disusun. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2019 ini disusun sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden nomor 7 Tahun Anggaran 1999 tentang Akuntabel Kinerja Instansi Pemerintah dimana setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatan dan kinerjanya selama 1 Tahun Anggaran dalam bentuk laporan kinerja.

Dalam konteks manajemen sektor publik, Laporan pelaksanaan fisik dan keuangan memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sarana bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas kepada seluruh stakeholders (DPRD, Kepala Daerah dan masyarakat). Kedua, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang. Untuk memenuhi kedua fungsi utama itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja untuk Tahun Anggaran 2019.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 merupakan laporan Tahun Anggaran ke dua dari siklus lima Tahun Anggaran Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2016 – 2021. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun Anggaran 2019 sepenuhnya mengacu pada Renstra. Sebagai bagian unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai, maka semua materi dan substansi dalam Renstra, Renja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai mengacu sepenuhnya kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai. yang berarti keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai merupakan kontribusi dan cerminan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Banggai secara keseluruhan.

Untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun Anggaran 2019 ini, penilaian capaian kinerja ditekankan **kepada pencapaian kinerja sasaran dan program**. Adapun pencapaian kinerja kegiatan (dengan indikator kinerja input, output, outcome) akan diselaraskan dengan pencapaian kinerja sasaran dan programnya.

Sesuai dengan Rencana Kinerja 2019, selama periode 2019 ini Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) melaksanakan **42 kegiatan** dalam **11 program** untuk memenuhi **3 sasaran strategis**. Untuk melaksanakan semua aktivitas ini disediakan anggaran dalam sumber dana DBHP, DBH, DID, DAK, DAU Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp13.800.272.897,00,-**.

Pada Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai melaksanakan **42 kegiatan** dalam **12 program** untuk memenuhi **3 sasaran strategis**. Untuk melaksanakan semua aktivitas ini disediakan anggaran dalam DBHP, DBH, DID, DAK, DAU Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp 13.945.001.058,00-**dengan realisasi penyerapan dana sebesar **Rp.12.542.304.301,00,-** atau sebesar **89.96%**.

Capaian kinerja selama Tahun Anggaran 2019 menunjukkan bahwa secara umum Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai cukup berhasil memenuhi **3 sasaran strategis** dengan prosentase capaian sebesar **(89.96%)**.

Sasaran strategis yang telah berhasil dicapai tersebut adalah:

"Meningkatnya Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Banggai"

Indikator Kinerja dan Pencapaian Sasaran

Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi rencana strategis di atas, Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai. Target ditetapkan untuk setiap indikator kinerja, baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja (input, output dan outcome) tingkat kegiatan.

Berikut ini rincian target dan realisasi anggaran belanja berdasarkan kelompok dan jenis belanja, baik untuk Belanja Tidak Langsung (BTL), Belanja Langsung (BL).

No	Kelompok dan Jenis Belanja	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Penyerapan Anggaran
A.	Belanja Tidak Langsung			
1.	Belanja Pegawai	4.993.313.622,00	4.646.392.003,00	93.05%
	JUMLAH (A)	4.993.313.622,00	4.646.392.003,00	93.05%
B.	Belanja Langsung			
1.	Belanja Modal	3.040.543.000,00	2.518.535.500	81.52%
2.	Belanja Barang/Jasa	5.911.144.436,00	5.377.376.798	95.50%

No	Kelompok dan Jenis Belanja	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Penyerapan Anggaran
	JUMLAH (B)	8.951.687.436	7.895.912.298	88.51%
	J U M L A H (A + B)	13,945,001,058.00	12.542.304.301	89.94%

Persentase realisasi penyerapan anggaran belanja secara keseluruhan adalah sebesar **(89.94%)** tidak terserapnya seluruh anggaran, dimana pada beberapa kegiatan dan jenis belanja tidak dapat dilaksanakan.

Kendala dan Permasalahan Pencapaian Kinerja

Di balik hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dan program untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja instansi yang secara rinci telah dijelaskan pada uraian pencapaian kinerja sasaran. Secara umum, kendala dan permasalahan yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah Pusat yang berimbas terjadinya penundaan Transfer dana Pusat ke Daerah (DBH), dan beberapa kegiatan dilakukan pergeseran Anggaran.
2. Perencanaan Kegiatan di Bidang perlu dimaksimalkan.
3. Porsi Anggaran yang ada di DPA perlu disesuaikan dengan kebutuhan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Strategi Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang sekaligus menjadi kendala dan tantangan, diperlukan strategi pemecahan masalah yang memadai dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai dimasa-masa yang akan datang. Diantara strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan perhatian pada setiap kegiatan yang bersumber dana DBH untuk dilaksanakan sesuai waktu pelaksanaan yang tertuang dalam DPA.
2. Mengoptimalkan Perencanaan dan Program OPD dalam merencanakan Program dan Kegiatan yang strategis.
3. Menfokuskan Pengelolaan dan peningkatan Sarana dan prasarana daya tarik wisata unggulan Kabupaten Banggai yang diharapkan dapat menunjang PAD.
4. Dalam Pembangunan Pariwisata kedepan harus dilakukan dengan pola pembangaunan lintas sektor, lintas Instansi, dan stakeholders lainnya sehingga Program dan kegiatan dapat dilakukan secara lebih intensif, efektif dan berkelanjutan.

5. Meningkatkan kemampuan teknis dan fungsional aparatur melalui pendidikan dan pelatihan SDM
6. Strategi yang tidak kalah penting adalah adanya pemberian penghargaan kepada aparatur Dinas Pariwisata yang berprestasi dan sebaliknya memberikan sanksi bagi aparatur Dinas Pariwisata yang indiscipliner (Reward and Punishment Systems) sehingga akan meningkatkan motivasi aparatur dalam beraktivitas yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja Dinas Pariwisata Kab. Banggai

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi mandiri terhadap output masing-masing kegiatan, kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai pada umumnya telah selaras dengan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai dengan nilai capaian kinerja rata-rata **80-100%**.

Diharapkan dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini dapat dijadikan alat pembanding dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai untuk Tahun Anggaran mendatang sehingga Pariwisata menjadi berkembang dan lebih baik lagi.

Luwuk, Januari 2020.


KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BANGGAI
Drs. H. PAIMAN KARTO, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19630612 198903 1 013

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
IKTISAR EXKLUSIVE	2
DAFTAR ISI	6
BAB.I PENDAHULUAN.....	7
A. Gambaran Umum Organisasi.....	7
B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	7
C. Struktur Organisasi	9
D. Isu Strategis yang dihadapi Organisasi	10
E. Sistematika Penulisan	14
BAB.II PERENCANAAN KINERJA	15
A. Rencana Strategis	15
B. Tujuan dan Sasaran	16
C. Kebijakan, Strategi dan Program	16
D. Perjanjian Kinerja	18
E. Program untuk Pencapaian Sasaran.....	21
BAP. III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Capaian Kinerja Organisasi	22
1. Pengukuran Kinerja	22
2. Capaian Kinerja	23
3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	23
4. Akuntabilitas Keuangan	26
5. Analisa dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	27
6. Prestasi dan Penghargaan	30
BAP. IV PENUTUP	31



Bab 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2019 adalah:

Untuk memberikan gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai selama Tahun Anggaran 2019.

Sebagai tolok ukur dalam penilaian kinerja personil/perangkat Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2019.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai selama periode Tahun Anggaran 2019.
2. Mendorong pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (good governance) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijaksanaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Memberikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.
4. Memelihara kepercayaan masyarakat kepada Dinas Pariwisata Kab. Banggai

Dari laporan ini diharapkan dapat diperoleh suatu simpulan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat dipergunakan sebagai tolok ukur dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Tahun Anggaran berikutnya.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2001, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas–Dinas Daerah Kabupaten Banggai dalam rangka perampingan/penghematan struktur organisasi, Tiga tahun berselang kemudian diubah menjadi PERDA Nomor 12 tahun 2003 yang memuat tentang Struktur Tugas Pokok dan Fungsinya. Dalam perjalanannya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banggai Kemudian berubah menjadi Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tanggal 1 September 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai. Dalam hal ini Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengalami perubahan, yaitu Bidang Kebudayaan menjadi Kewenangan SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Banggai, Bidang Ekonomi Kreatif merupakan salah satu Bidang yang baru menggantikan Bidang Kebudayaan menyesuaikan dengan Tupoksi pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Banggai.

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pun kembali berubah dengan keluarnya Struktur Organisasi Baru dengan nama Organisasi Perangkat Daerah **Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai** berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Laksana SKPD Dinas / Badan /Kantor Pemerintahan Daerah dan Peraturan Bupati Banggai Nomor 9 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas,Fungsi, dan tata kerja Dinas Pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pariwisata;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pariwisata;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang pariwisata; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsinya, Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi 4 Kepala Bidang dan 1 Sekretaris dengan didukung oleh 12 Kepala Seksi, 3 Kepala Sub Bagian sebagai berikut:

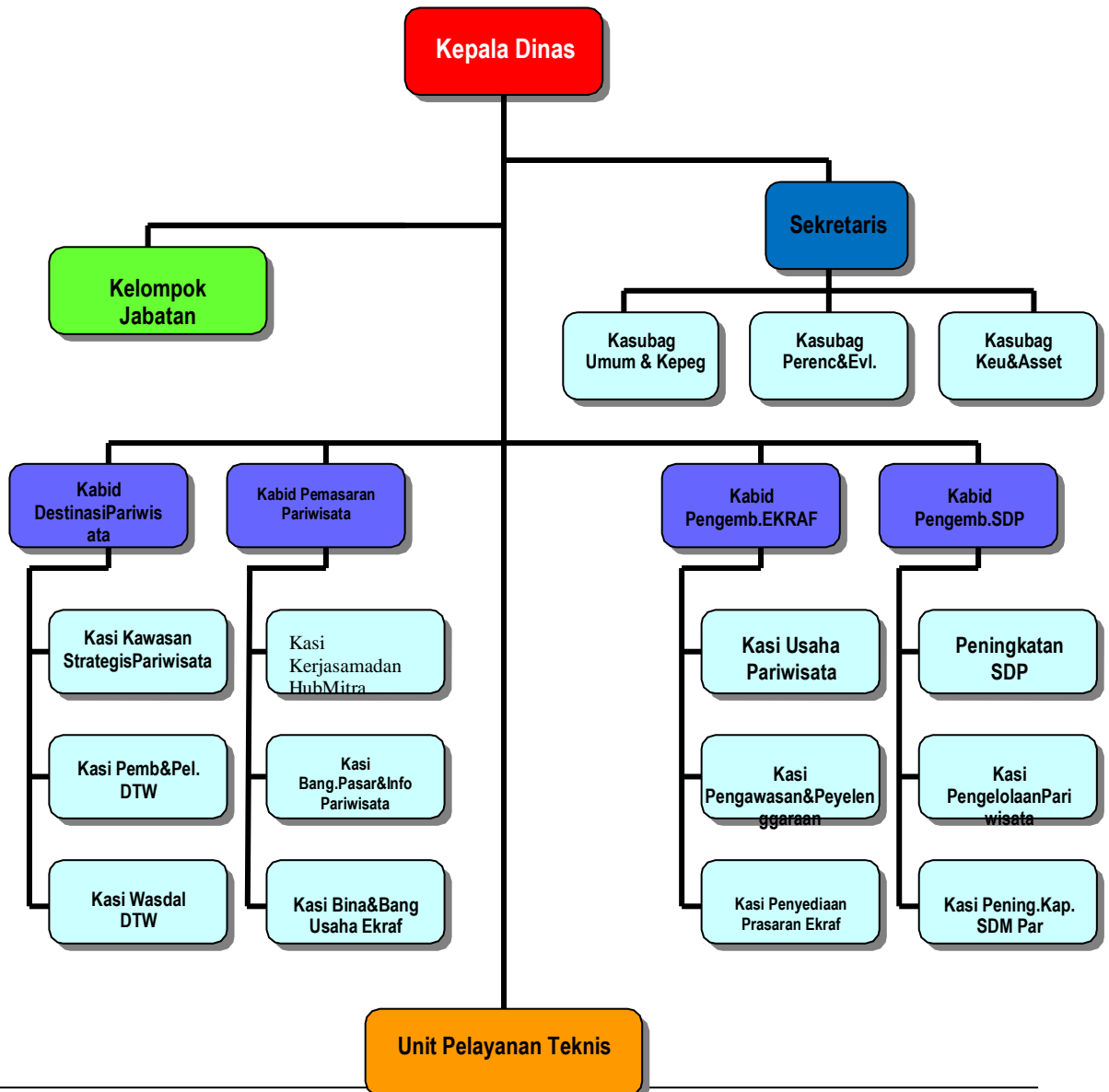
1. Sekretariat
2. Bidang Destinasi Pariwisata
3. Bidang Pemasaran Pariwisata
4. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif
5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari:

Pegawai	Jumlah 1/1/2019	Tambah	Kurang	Jumlah 1/1/2019
Pejabat Struktural	21 Orang	-	-	21 Orang
Pejabat Fungsional	-Orang	-	-	-Orang
Pegawai Administrasi	26 Orang	-	-	26Orang
Pegawai Harian Tetap	21 Orang	-	-	21 Orang
Jumlah	68 Orang	-	-	68Orang

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai, telah dibentuk struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Bupati Banggai Nomor 9 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan tata kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai sebagai berikut:

Struktur Organisasi
Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai



1.3 Isu Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai

Pariwisata seringkali dipersepsikan sebagai mesin ekonomi penghasil devisa, namun demikian ada prinsipnya pariwisata memiliki spektrum fundamental pembangunan yang lebih luas dan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan Persatuan dan Kesatuan; Penghapusan Kemiskinan (Poverty Alleviation); Pembangunan Berkesinambungan (Sustainable Development); Pelestarian Budaya (Culture Preservation); Pemenuhan Kebutuhan Hidup dan Hak Azasi Manusia; Peningkatan Ekonomi dan Industri; dan Pengembangan Teknologi. Pembangunan pariwisata mampu memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berusaha dan bekerja. Kunjungan wisatawan ke suatu daerah dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pariwisata akan mampu memberi andil besar dalam penghapusan kemiskinan di berbagai daerah yang miskin potensi ekonomi selain potensi alam dan budaya bagi kepentingan pariwisata. Dengan sifat kegiatan pariwisata yang menawarkan keindahan alam, kekayaan budaya dan keramahtamahan pelayanan, sedikit sekali sumberdaya yang habis digunakan untuk menyokong kegiatan ini. Bahkan berdasarkan berbagai contoh pengelolaan kepariwisataan yang baik, kondisi lingkungan alam dan masyarakat di suatu destinasi wisata mengalami peningkatan yang berarti sebagai akibat dari pengembangan kepariwisataan di daerahnya.

Pembangunan kepariwisataan mampu memberikan kontribusi nyata dalam upaya-upaya pelestarian budaya suatu negara atau daerah yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya negara atau daerah. Dalam konteks tersebut, sudah selayaknya untuk menjadikan pembangunan kepariwisataan sebagai pendorong pelestarian ekonomi kreatif di berbagai daerah.

Pariwisata pada masa kini telah menjadi kebutuhan dasar kehidupan masyarakat modern. Pada beberapa kelompok masyarakat tertentu kegiatan melakukan perjalanan wisata bahkan telah dikaitkan dengan hak azasi manusia khususnya melalui pemberian waktu libur yang lebih panjang dan skema paid holidays. Pengelolaan kepariwisataan yang baik dan berkelanjutan mampu memberikan kesempatan bagi tumbuhnya ekonomi di suatu destinasi pariwisata. Penggunaan bahan dan produk lokal dalam proses pelayanan di bidang pariwisata akan juga memberikan kesempatan kepada industri lokal untuk berperan dalam penyediaan barang dan jasa. Syarat utama dari hal tersebut diatas adalah kemampuan usaha pariwisata setempat dalam memberikan pelayanan berkelas dengan menggunakan bahan dan produk lokal yang berkualitas. Dengan semakin kompleks dan tingginya tingkat persaingan dalam mendatangkan wisatawan ke suatu destinasi, kebutuhan akan teknologi tinggi khususnya teknologi industri akan mendorong destinasi pariwisata mengembangkan kemampuan penerapan teknologi terkini.

Dengan demikian pembangunan kepariwisataan akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintahan di berbagai daerah yang lebih luas dan bersifat fundamental. Kepariwisataan akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembangunan

suatu daerah dan terintegrasi dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Keterkaitan antara sasaran jangka menengah Kementerian/Lembaga dan Kabupaten/Kota dengan pembangunan pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai, meliputi :

1. Meningkatnya apresiasi, kreativitas dan produktivitas terhadap keragaman seni budaya daerah;
2. Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing;
3. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan pergerakan wisatawan nusantara;
4. Mendukung peningkatan kontribusi pariwisata bagi perekonomian terhadap PDRB, lapangan kerja, dan investasi;
5. Meningkatnya kapasitas SDM aparatur/industri dan masyarakat bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
6. Meningkatnya kapasitas untuk penelitian dan pengembangan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
7. Meningkatnya investasi di sektor pariwisata;
8. Meningkatnya citra kepariwisataan daerah;
9. Terciptanya diversifikasi destinasi pariwisata;
10. Terciptanya pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien;
11. Meningkatnya unit usaha sektor ekonomi kreatif;
12. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ekonomi kreatif;
13. Terciptanya ruang publik bagi masyarakat;
14. Meningkatnya kualitas konten dan jejaring pelaku di sektor ekonomi kreatif.

Isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai.

Beberapa permasalahan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, antara lain sebagai berikut :

1. Terbatasnya SDM Aparatur yang memahami tentang penyusunan Program dan Kegiatan sesuai dengan IKI dan target Capaian Kinerja Aparatur Dinas Pariwisata.
2. Alokasi Anggaran yang disediakan untuk mendukung Program dan Kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata di Kab. Banggai masih kurang.
3. Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Sadar Wisata dalam mengelolah potensi Daya Tarik Wisata perlu menjadi perhatian untuk ditingkatkan.
4. Status lokasi yang memiliki potensi daya tarik wisata sebagian besar masih dimiliki penduduk setempat sehingga dalam pengembangannya mengalami kendala.

5. Belum maksimalnya upaya peningkatan kegiatan Inovasi ruang eksplorasi seni dan budaya di wilayah-wilayah pelosok daerah sehingga tidak hanya terpusat di ibu kota kabupaten.

2.3.1. Permasalahan Dalam Lingkup SKPD

Berdasarkan fungsi pelayanan SKPD, Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai saat ini diperhadapkan pada beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penganggaran dalam skala prioritas urusan pariwisata.
2. Kesamaan kondisi objek wisata dengan daerah lain sehingga membutuhkan perencanaan yang matang, akurat dan terarah pada konsep pengembangan pariwisata agar dapat berkompetisi dengan daerah lain.
3. Status kepemilikan potensi DTW yang belum jelas sehingga membutuhkan penetapan dari pemerintah.
4. Kualitas produk kepariwisataan yang belum maksimal menyebabkan promosi pariwisata Kabupaten Banggai menuju skala nasional dan internasional belum berdampak secara signifikan dalam mendatangkan kunjungan wisatawan.
5. Minimnya sarana dan prasarana untuk servis publik pengunjung yang memerlukan perhatian.
6. Perlunya upaya mengangkat kesenian daerah sebagai suatu kearifan lokal yang dapat menciptakan nilai tambah dalam mempromosikan pariwisata Kab. Banggai.
7. Pengaruh Nomen clatur pada instansi urusan pariwisata sehingga pengembangan kepariwisataan membutuhkan evaluasi kembali tentang arah pencapaian kinerja.

Penyusunan Laporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai tahun 2017-2021 didasarkan pada :

- 1.1.1 UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
- 1.1.1 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 1.1.2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
- 1.1.3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
- 1.1.4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- 1.1.5 Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 1.1.6 Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 1.1.7 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).
- 1.1.8 Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 dan Sesuai RPJM Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kewenangan Masing-masing OPD.
- 1.1.9 Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- 1.1.10 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 26 tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai.dan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 40 tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai.
- 1.1.11 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai
- 1.1.12 Peraturan Bupati Banggai Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pariwisata.
- 1.1.13 Standar Pelayanan Maksimal (SPM) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- 1.1.14 Visi, Misi dan Program Bupati Banggai 2016-2021.
- 1.1.15 Tugas Pokok dan Fungsi OPD Dinas Pariwisata Ka. Banggai

1.5 Sistematika Penyusunan

Penulisan Laporan Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai tahun 2019 disusun dengan sistematika mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Bab I

Pendahuluan : Menjelaskan tentang organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi

Bab II

Perencanaan

Kinerja : Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis yang diawali dari Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja sebelum reviu dan hasil reviu

Bab III

Akuntabilitas

Kinerja

: Menyajikan Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja, sasaran strategis organisasi sesuai hasil pengukuran yang disertai dengan evaluasi dan analisis yang memadai menyajikan akuntabilitas keuangan berupa anggaran dan realisasinya, dan tingkat efektifitas anggaran terhadap pencapaian sasaran.

Bab IV

Penutup

: Mengemukakan tinjauan secara umum mengenai keberhasilan/kegagalan, permasalahan/kendala yang berkaitan dengan kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai, dan strategi pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja periode berikutnya

Lampiran

: Berisi lampiran-lampiran lainnya



Bab 2

Perencanaan Kinerja

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan Citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Bupati Banggai tahun 2016 s.d 2021 adalah :

"Mewujudkan Kabupaten Banggai sebagai pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan kemaritiman berbasis kearifan Lokal dan Budaya"

Dengan Visi tersebut seluruh stakeholder Periwisata di Kabupaten Banggai yang meliputi komponen masyarakat, pemerintah, dunia usaha, perangkat desa, pelaku wisata, lembaga swadaya, dan pelaku lainnya, diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam proses pemberdayaan serta berperan aktif dalam pengembangan pariwisata guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Misi adalah sesuatu yang harus di emban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, bagian penjabaran visi yang telah di tetapkan. Dengan pernyataan misi di harapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi pembangunan Bupati Banggai saat ini adalah sebagai berikut :

MISI 1 : Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih menuju pemerintahan yang berwibawa

MISI 2 : Mengembangkan pertanian melalui pemanfaatan teknologi

MISI 3 : Mengembangkan sektor kemaritiman berbasis potensi wilayah

Misi 4 : Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan merata

MISI 5 : Mewujudkan pengembangan nilai-nilai agama kearifan lokal dan budaya

MISI 6 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang di formulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Mengacu pada pernyataan visi dan misi pembangunan di Kabupaten Banggai maka tujuan pembangunan Pariwisata yang hendak dicapai oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata yang mampu menarik dan meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan dengan dukungan peran serta dan sinergi kemitraan antar pelaku wisata serta media pemasaran yang efektif.

Sedangkan sasarannya adalah penjabaran dari tujuan, yaitu terwujudnya Destinasi Pariwisata yang berdaya saing dan unggul.

Tabel.
2.1

Keterkaitan Visi Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Mewujudkan Kabupaten Banggai sebagai pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan kemaritiman berbasis kearifan Lokal dan Budaya

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/IKU
1.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkeadilan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan berbasis potensi dan keunggulan lokal	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang di uraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan misi dan visi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Pariwisata merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RESTRA dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna).

Program operasional indikatif yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana.

Adapun Program Dinas Pariwisata Kab. Banggai sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan
6. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
7. Program Pengembangan Destinasi
8. Program Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
9. Program Peningkatan SDM Aparatur dan Kelembagaan Kepariwisata
10. Program Penyelenggaraan Bina Industri Pariwisata.

Dari Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan diatas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Bupati Banggai dalam mencapai tujuan dan merupakan Ikhtisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi

Tujuan Penetapan IKU adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan. Untuk Sasaran Strategis dan IKU dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2. Persentase Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara 3. Persentase Industri dan Kemitraan Ekraf yang memenuhi Standar Usaha Pariwisata 4. Persentase Sumber Daya Pariwisata yang berkualitas

B. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2019

Dokumen Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2019 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Tahun 2016 – 2021

Sejak Tahun 2016 Dinas Pariwisata melakukan cascade down Perjanjian Kinerja kepada Eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan dapat dilihat pada esakip.banggai.go.id. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja 2019 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, RENSTRA, RENJA 2019, IKU dan APBD Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Banggai. Adapun PK Dinas Pariwisata tahun 2019 sebagai Berikut :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BANGGAI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. PAIMAN KARTO, MM

Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Pihak Pertama

Nama : H. HERWIN YATIM

Jabatan : Bupati Banggai

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap capaian diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Luwuk, Januari 2019

Pihak Pertama,

Pihak Kedua

H. HERWIN YATIM


Drs. H. PAIMAN KARTO, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19630612 198903 1 013

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANGGAI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Banggai	Persent	100

Program :	Anggaran
1. Prog. Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Rp. 2.438.000.000
2. Prog. Pengembangan Destinasi Pariwisata	Rp. 3.429.046.000
3. Prog. Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan & Pengembangan Ekraf	Rp. 325.000.000
4. Prog. Peningkatan SDM Aparatur & Kelembagaan Kepariwisata	Rp. 901.647.000
5. Prog. Penyelenggaraan Bina Industri pariwisata	Rp. 554.047.000
Total Anggaran	Rp. 7.647.740.000

Pihak Pertama,

H. HERWIN YATIM

Pihak Kedua



C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan Visi Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai. Adapun Program-program yang mendukung sasaran tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel. 2.3

Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Didukung Program
1.	Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisatawan	<ol style="list-style-type: none">1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata2. Program Pemasaran Pariwisata3. Program Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif4. Peningkatan SDM Aparatur dan Kelembagaan Kepariwisata5. Penyelenggaraan Bina Industri Pariwisata

Bab 3

Akuntabilitas Kinerja

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja Merupakan Tahap analisis untuk mengetahui seberapa jauh capaian kinerja yang telah dicapai selama pelaksanaan kinerja tahun berjalan dengan cara membandingkan rencana dengan realisasinya. Sedangkan Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pengukuran Kinerja dilakukan terhadap sasaran, program dan kegiatan Dinas pariwisata Kabupaten Banggai yang dilaksanakan pada tahun 2019. Sasaran penyelenggaraan Dinas Pariwisata Kabupaten banggai Tahun 2019 yang diukur kinerjanya adalah sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA dan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2019. Sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran diformulasikan dengan indicator kinerja output/outcome dari program-program yang digunakan sebagai strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Pariwisata Kabupaten banggai tahun 2016-2021.

Pengukuran Kinerja sasaran Dinas pariwisata Kabupaten banggai tahun 2019 menggunakan formulir pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut didasarkan pada rencana(target) kinerja sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2019 yang dimuat dalam penetapan kinerja tahun 2019.

Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, dengan rumus yang digunakan :

$$2. \text{ Persentase Capaian Kinerja : } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin kurang baik, dengan rumus yang digunakan :

$$1. \text{ Persentase Capaian Kinerja : } \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala Nilai Peringkat Kinerja sebagai berikut :

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90.1	Sangat Tinggi
2	$75.1 \leq 90$	Tinggi
3	$65.1 \leq 75$	Sedang
4	$50.1 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri No. 54 tahun 2010

2. CAPAIAN KINERJA

Secara umum Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara kinerja dengan realisasi kinerja. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2019
Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai
Berdasarkan RENSTRA

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Realisasi
1	Persentase Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara	25.000 Org	53.324 Org	113.29%
3	Persentase Industri dan Kemitraan Ekraf yang memenuhi Standar Usaha Pariwisata	2.74%	567.148.100	33.03%
4	Persentase Sumber Daya Pariwisata yang berkualitas	3.98%	701.484.943	24.65%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja Utama Dinas Pariwisata Kab. Banggai tahun 2019, disimpulkan bahwa indikator sasaran dengan skala nilai peringkat kinerja rata-rata capaian sebesar 56.99%

3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Tahapan akuntabilitas kinerja berikut yaitu evaluasi kinerja bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai didalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Dalam Sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai yang dicerminkan dalam capaian indikator kinerja yang akan diuraikan sebagai berikut :

Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan. Sasaran Strategis ini ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa ukuran berkembangnya pariwisata yang ada di Kabupaten Banggai sangat jelas capaiannya bila banyak wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun Wisatawan Nusantara yang berkunjung ke Kabupaten Banggai. Dan untuk mencapai sasaran strategis sesuai IKU maka perlu didukung dengan pencapaian program sesuai Renstra.

Tabel. 3.2

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian %	
1	Persentase Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara	27.656 Org	25.000 org	53.324 Org	113,29	90%
	Persentase Industri dan Kemitraan Ekraf yang memenuhi Standar Usaha Pariwisata	30.29%	2.74%	567.148.100	33.03	2.74
	Persentase Sumber Daya Pariwisata yang berkualitas	24.24%	3.98%	701.484.943	24.65	3.98

1. Jumlah Kunjungan Wisatawan

Destinasi Wisata Kabupaten Banggai yang sudah dikenal oleh wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestic adalah Wisata Air terjun Salodik dan Pulo Dua yang rata-rata kunjungannya setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2018 jumlah kunjungan Wisatawan Kabupaten Banggai terdiri dari Wisatawan Mancanegara sejumlah 3.894. orang dan Wisatawan Domestik sejumlah 23.762. Sedangkan pada tahun 2019 jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara sejumlah 4.898 orang dan Wisatawan Nusantara sejumlah 48.426 orang. Dan bila dipersentasekan jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara tahun 2019 naik 25.78% sedangkan Wisatawan Nusantara naik sebesar 103%. Sehingga bila diperbandingkan dengan target capaian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIPI) Tahun 2020
wisatawan pada tahun 2019 telah melebihi target 90%. Dan Berdasarkan pengambilan data kunjungan wisatawan, sebagian besar jumlah kunjungan wisatawan yang ada di Kabupaten Banggai di dominasi oleh dua daya tarik wisata yang sudah dikenal oleh

wisawatan yaitu Daya Tarik Wisata Air Terjun Salodik di Kec. Luwuk Utara dan Pulo Dua di Kecamatan Balantak Utara.

Faktor pendukung dalam tercapainya target indikator jumlah kunjungan wisatawan adalah tersedianya Sarana dan Prasarana di lokasi daya tarik wisata Air Terjun Salodik dan Pulo Dua. Dan semakin gencarnya promosi yang dilakukan baik lewat media social, Festival dan pameran luar daerah serta promosi yang juga dilakukan oleh lembaga-lembaga pariwisata yang ada di kabupaten Banggai yang sangat mendukung berkembangnya Pariwisata yang ada di Kabupaten Banggai.

Permasalahan :

1. Sektor Pariwisata sesuai RPJMD yang merupakan sektor unggulan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat lewat program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya di wilayah-wilayah destinasi wisata, tidak didukung dengan kebijakan anggaran yang dialokasikan pada Dinas Pariwisata Kab. Banggai dalam upaya pengembangan Pariwisata Daerah.
2. Perencanaan Pembangunan Pariwisata yang tidak terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik dengan berbagai bidang dan lintas sektor menyebabkan pembangunan pariwisata baik itu secara fisik non fisik, tidak berjalan dengan baik sesuai target capaian yang diharapkan.
3. Sarana yang telah tersedia dan telah dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai di lokasi daya tarik wisata khususnya daya tarik wisata unggulan belum memiliki daya dukung infrastruktur yang memadai.
4. Pengembangan dan Pembangunan Daya Tarik Wisata baik yang ada di Desa dan Kecamatan sebagian besar belum memiliki legalitas tanah yang jelas.
5. Program dan kegiatan di bidang ekonomi kreatif dan sumber daya pariwisata belum secara maksimal dilakukan karena keterbatasan anggaran.

Solusi :

1. Bahwa pengembangan Pariwisata Kabupaten Banggai dalam RPJMD harus didukung dengan kebijakan anggaran yang proporsional sehingga pariwisata Kabupaten Banggai benar-benar dapat berkembang dan maju.
2. Perlu dilakukan perencanaan pembangunan Pariwisata Kabupaten Banggai yang terkoordinasi dan terintegrasi dengan berbagai bidang dan lintas sektor.
3. Pengembangan Pariwisata khususnya daya tarik wisata harus di dahului dengan pembangunan Prasarana daya dukung yang berkelanjutan termasuk pembuatan masterplan, sehingga sarana dan prasarana pemerintah yang disediakan di lokasi daya tarik wisata dapat dimanfaatkan secara maksimal.
4. Untuk kepastian dan kemudahan Pengembangan daya tarik wisata dan untuk menghindari terjadinya masalah terkait kepemilikan lokasi daya tarik wisata, maka perlu dipastikan legalitas tanah di setiap Desa dan Kecamatan.
5. Untuk memaksimalkan pengembangan usaha ekonomi kreatif dan pengembangan sumber daya pariwisata dan promosi pariwisata baik dalam daerah, luar daerah dan luar negeri, maka harus di dukung pula dengan ketersediaan dana sehingga program dan kegiatan yang strategis dan inovatif dapat dilaksanakan.

Langkah Strategis :

1. Untuk meningkatkan Kepariwisataan di Kabupaten Banggai yang memiliki peranan penting menopang perekonomian masyarakat maka perlu pembentukan Desa Wisata dan Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata.

2. Sebagai langkah strategis untuk meningkatkan promosi pariwisata maka perlu di laksanakan event Festival Luar Negeri yang bisa mendatangkan wisatawan mancanegara sehingga potensi daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Banggai semakin dikenal di dunia.
3. Meningkatkan Kemitraan baik dalam bidang usaha ekonomi kreatif, promosi pariwisata dan investasi pariwisata dengan berbagai pihak baik akademisi maupun pelaku usaha pariwisata.

3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai dibiayai dengan sumber dana APBD Kabupaten Banggai, dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung adalah dana penunjang yang tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan kegiatan strategis, tetapi dikeluarkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan sehingga dapat berlangsung kegiatan operasional kantor/dinas sehari-hari misalnya (gaji dan tunjangan, serta tambahan penghasilan lainnya yang sah bagi ASN)

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung adalah merupakan dana yang digunakan untuk membiayai secara langsung program dan kegiatan-kegiatan strategis, terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Anggaran yang digunakan untuk merealisasikan target capaian dan sasaran program/kegiatan di lingkup Dinas Pariwisata Kab. Banggai sebesar Rp. 7.895.912.298 (88.21%) dari alokasi anggaran sebesar Rp. 8.951.687.436. Jadi sisa anggaran belanja langsung sebesar Rp. 1.055.775.138 (11.79%)

Secara garis besar pelaksanaan realisasi keuangan dinas pariwisata telah sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan, dan pertanggungjawabannya telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

4. Analisa Penyebab Penurunan Kinerja serta Solusi yang dilakukan

a. Penyebab Penurunan Kinerja

Analisa Penyebab penurunan kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan yang dilakukan dalam pengembangan potensi Daya Tarik Wisata belum dilakukan secara matang, terarah dan berkelanjutan.
2. Program dan kegiatan yang strategis tidak sesuai dengan volume anggaran yang disediakan.

b. Solusi

Solusi yang dapat dilakukan dalam upaya peningkatan Kinerja Dinas Pariwisata Kab. Banggai adalah :

1. Dalam merencanakan pembangunan Daya tarik wisata harus dibuatkan masterplan dan perlu dikoordinasikan dengan pemerintah desa tentang kepastian legalitas tanah/lokasi pengembangan DTW.

2. Harus ada upaya Dinas Pariwisata dalam melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Pariwisata bahkan lintas sektor/kementerian dalam pendanaan program kegiatan yang strategis dan inovatif.
3. Perlu ditingkatkan kegiatan-kegiatan yang bersifat peningkatan kualitas SDM Aparatur sehingga kedepannya, SDM Aparatur Pariwisata Kab. Banggai semakin berkualitas dan professional.

5. Analisa dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kemajuan Pariwisata yang ada di Kabupaten Banggai tidak hanya ditentukan oleh potensi Daya tarik Wisata yang ada dan tersebar di berbagai daerah, tetapi juga sangat ditentukan oleh tersedianya dua unsur yaitu :

SDM Aparatur Pariwisata Dinas Pariwisata Kab. Banggai dan SDM Pariwisata yang secara langsung mengelolah dan bersentuhan langsung dengan potensi pariwisata atau usaha pariwisata itu sendiri. Dan Kabupaten Banggai diperhadapkan pada posisi yang sangat dilematis karena kedua unsur tersebut di atas sama-sama lemah karena, selain SDM Aparatur Pariwisata belum memiliki Kemampuan dalam merencanakan program dan kegiatan yang stragegis dan inovatif, Profesionalisme dalam mengelolah potensi daya tarik wisata serta Kualitas dan Mutu Pelayanan usaha Pariwisata masih kurang dan sangat berpengaruh terhadap citra Pariwisata secara keseluruhan yang ada di Kab. Banggai. Kedepan yang perlu dilakukan adalah peningkatan SDM Aparatur Pariwisata dan memfasilitasi sumber daya pariwisata untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM, melalui pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi sehingga dalam kondisi memasuki era globalisasi SDM Pariwisata dapat bersaing dengan kualitas dan kuantitas serta profesionalisme dan kompetensi standar internasional. Maka dengan itu Efisiensi penggunaan Sumber Daya dapat tercapai.

B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Kabupaten Banggai Tahun Anggaran Anggaran 2019, Dinas Pariwisata Kabupaten Banggaitelah menerima alokasi anggaran belanja sebesar **Rp 13.945.001.058,00,-** yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) **Rp 4.993.313.622,00,-** Belanja Langsung **Rp 8.951.687.436,00,-**.

Dana yang dianggarkan dan realisasinya untuk melaksanakan kegiatan dan program dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dapat dirinci sebagai berikut:

No	Sasaran	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Penyerapan Anggaran
1.	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Pada Pelayanan Administrasi Perkantoran	907.242.800,00	834.908.910,00	99.14%
2.	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur kedinasan	88.400.000,00	67.356.220,00	97.81%

No	Sasaran	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Penyerapan Anggaran
3.	Tersedianya Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	2.250.000,00	2.242.000,00	99.67%
4.	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	12.000.000,00	11.997.650,00	100 %
5.	Meningkatnya pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan	62.000.000,00	61.999.850,00	99.99%
6.	Terlaksananya Perencanaan Umum dan jasa administrasi Pengadaan Barang/jasa	56.313.086,00	56.313.086,00	100%
7.	Terlaksananya kegiatan promosi dan pengembangan pemasaran pariwisata	3.070.287.900,00	2.842.268.729,00	99.97%
8.	Terlaksananya kegiatan pengembangan Destinasi pariwisata	3.324.813.000,00	2.750.192.396,00	82.71%
9.	Terlaksananya Kegiatan Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	165.100.000,00	132.849.400,00	80.46%
10.	Terlaksananya kegiatan peningkatan SDM Aparatur dan Kelembagaan Kepariwisata	807.647.450,00	701.484.943,00	86.85%
11.	Terselenggaranya kegiatan Bina Industri Pariwisata	455.633.200,00	434.298.700,00	95.31%
JUMLAH		8,951,687,436.00	7,895,911,884.00	95.20%

Sedangkan rincian target dan realisasi anggaran belanja berdasarkan program dan masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

No	Program dan Kegiatan	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Penyerapan Anggaran
VII	Pengembangan Pemasaran Pariwisata			
1.	Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata	320.000.000	296.454.440	97.45
2.	Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata	50.000.000	48.776.400	100
3.	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara didalam dan diluar Negeri	1.875.000.000	2.317.312.889	92.36
4.	Pembinaan Pengawasan Ekonomi Kreatif	193.000.000	179.725.000	86.28

No	Program dan Kegiatan	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Penyerapan Anggaran
VIII	Pengembangan Destinasi Pariwisata			
1.	Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan	50.000.000	-	96.62
2.	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	2.622.810.000	2.109.683.696	79.26
3.	Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan	546.736.000	444.169.700	99.10
4.	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata	19.000.000	17.526.000	70.53
5.	Pengembangan Daerah tujuan wisata	60.500.000	51.263.000	84.73
6.	Pengembangan, Sosialisasi dan Penerapan Swera Pengawasan Standarisasi	130.000.000	127.550.000	98.12
IX.	Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif			
1.	Pengembangan Kreatifitas Bidang Ekonom Kreatif yang Mendukung Kepariwisataaan	120.000.000	62.537.000	99.07
2.	Pengembangan Dukungan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya	205.000.000	70.312.400	70.31
X.	Peningkatan SDM Aparatur dan Kelembagaan Kepariwisataaan			
1.	Pengembangan SDM Aparatur di Bidang Kepariwisataaan	269.554.000	209.585.260	99.74
1.	Pelatihan Peningkatan Kapasitasb SDM dan Kelembagaan Kelompok Sadar Wisata	514.593.000	479.399.683	97.15
2.	Pembentukan Kelompok Pramuka Wisata	47.500.000	12.500.000	32.47
3.	Pembentukan Kelompok Sadar Wisata	70.000.000	-	0
IX.	Penyelenggaraan Bina Industri Pariwisata			
1.	Pengembangan Industri Pariwisata	200.000.000	176.851.200	95.24
2.	Pengembangan Kemitraan Usaha Industri Pariwisata	354.047.000	257.447.500	95.37

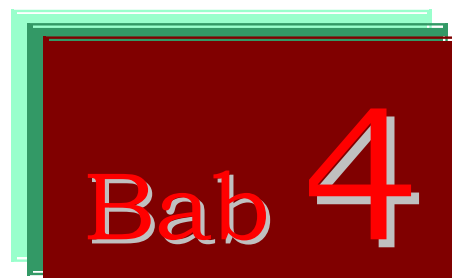
No	Program dan Kegiatan	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Penyerapan Anggaran
J U M L A H		8,796,168,036.00	7,859,103,298.00	96.45

Rincian target dan realisasi anggaran belanja sebagaimana terlihat pada 2 (dua) tabel di atas tidak termasuk target dan realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) karena BTL tidak terkait langsung dengan kegiatan dan belum dapat terlihat pembebanan alokasi BTL ke masing-masing kegiatan.

PRESTASI DAN KINERJA

Penghargaan yang diraih Perangkat Daerah

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Perangkat Daerah Penerima Penghargaan
1.	100 Calendar of Event Festival Pulo Dua	Kementerian Pariwisata	Dinas Pariwisata
2.	Ruang Eksplorasi Seni (RELASI) dan Banggai Tourism Board (BTB)	IGA Award dan Kemenpan RB	Dinas Pariwisata



Bab 4

Penutup

Laporan Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Tahun 2019 telah menggambarkan kinerja Dinas Pariwisata Kab. Banggai dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa capaian kinerja kegiatan dan sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada Tahun 2019 Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai menetapkan Sasaran dan indikator kinerja berdasarkan Revisi Indikator Kinerja Utama dalam Rencana Strategis tahun 2016-2021.

Bahwa Pelaksanaan Tugas dan Kewajiban lewat program dan kegiatan yang telah disusun dan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kab. Banggai selama periode tahun 2019 telah dilaksanakan secara maksimal dengan berbagai upaya memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan tetap menjaga asas akuntabilitas sehingga program dan kegiatan secara keseluruhan dapat dilaksanakan, walaupun dalam pelaksanaannya ada beberapa kegiatan strategis tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena keterbatasan anggaran yang tersedia hal tersebut berdampak pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pariwisata Kab. Banggai pada tahun anggaran 2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan laporan tentang penyelenggaraan pemerintahan dalam daerah yang menggambarkan tingkat pencapaian keberhasilan dalam mendukung pencapaian visi dan misi atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban dalam periode tahun 2019 ini. Dan dalam rangka efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan telah dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2019.

Dengan disusunnya laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata Kab. Banggai tahun 2019, akan dipergunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Banggai khususnya Dinas pariwisata

melalui capaian pelaksanaan program dan kegiatan sebagai acuan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.



Lampiran – Lampiran
